BUPATI BELITUNG TIMUR

PENGUMUMAN

NOMOR : KP.02/ 015 /PENGUMUMAN/BUPATI/2024

TENTANG

SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

Dalam rangka pengisian kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Belitung Timur membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang berminat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan PNS Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024; dan
6. Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 Dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini, dan seluruh peserta WAJIB MEMBACA dan MEMPEDOMANI ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini dan hanya berlaku pada Penerimaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Formasi Tahun Anggaran 2024.

II. ALOKASI KEBUTUHAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. Jumlah Alokasi Kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil

Alokasi kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024 sejumlah 206 (dua ratus enam) dengan rincian sebagaimana tercantum pada lampiran Pengumuman ini.

B. Jenis Alokasi Kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil

Alokasi penetapan kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024 meliputi:

1. Penetapan Kebutuhan Umum yang dialokasikan bagi setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Penetapan Kebutuhan Khusus yang dialokasikan bagi:
   Penyandang disabilitas, dengan ketentuan pelamar berkebutuhan khusus yang mengalami keterbatasan fisik dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya dan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

C. Deskrispi Tugas Jabatan dan Rentang Penghasilan Per Jabatan

1. Informasi terkait deskripsi tugas jabatan pada alokasi kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang masing-masing Jabatan Fungsional dan Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2024 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di lingkungan Instansi Pemerintah.
2. Informasi terkait rentang penghasilan per Jabatan dapat dilihat/diakses pada portal *https://sscasn.bkn.go.id*.

III. PERSYARATAN

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
4. Bagi pelamar untuk jabatan dokter dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar.
5. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
6. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
7. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau Pyb.
9. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
10. Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan dengan ketentuan, sebagai berikut:
    a. Pelamar dengan kualifikasi pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat harus memiliki ijazah sekolah menengah atas yang terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; atau
    b. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan

Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.

c. Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.

11. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
12. Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan fungsional kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi harus melampirkan Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku sesuai jabatan yang dilamar;
13. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
14. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan satuan kerja/unit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah; dan
15. Bersedia mengabdi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan tidak akan mengajukan pindah antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur maupun pindah instansi dengan alasan apapun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, kecuali terdapat kebutuhan organisasi.
16. Khusus bagi Penyandang Disabilitas
    Pelamar merupakan penyandang disabilitas/ berkebutuhan khusus yang dibuktikan dengan persyaratan sebagai berikut:
    a. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/ puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
    b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
17. Pelamar penyandang disabilitas dapat juga melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas, dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. Pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
    b. Pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan:
        1) Dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/ Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
        2) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

Pendaftaran seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dilakukan secara online mulai tanggal 20 Agustus s.d 6 September 2024 dengan alur sebagai berikut:

1. Pelamar membuat akun melalui *https://sscasn.bkn.go.id* dengan cara:
    a. Mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum di KK pelamar. Apabila pelamar mengalami kendala terkait data NIK dan Nomor KK, agar menghubungi/ melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
    b. Mengisi data identitas sesuai KTP maupun ijazah dan kolom lainnya;
    c. Mengunggah scan KTP dan swafoto;

d. Memastikan seluruh data yang telah dimasukkan dan foto yang diunggah sudah lengkap dan benar (jika terdapat kesalahan setelah proses pendaftaran, maka peserta tidak dapat memperbaikinya); dan
e. Mencetak Kartu Informasi Akun.

2. Pelamar login ke akun yang telah dibuat pada laman https://sscasn.bkn.go.id dengan menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan;
3. Pelamar melengkapi data diri dan memilih jenis disabilitas (bagi pelamar yang bukan penyandang disabilitas memilih non disabilitas, sedangkan bagi pelamar penyandang disabilitas memilih sesuai dengan jenis disabilitasnya untuk kemudian memasukkan link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai dengan jabatan yang dilamar);
4. Pelamar memilih jenis seleksi, yaitu seleksi CPNS;
5. Pelamar memilih instansi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dilanjutkan dengan memilih jenis alokasi kebutuhan (formasi), pendidikan, jabatan yang akan dilamar, lokasi formasi, dan lokasi tes, serta mengisi data IPK, nomor ijazah, tahun lulus, tanggal ijazah, nama perguruan tinggi, nama program studi, dan akreditasi program studi serta data lainnya;
6. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan yang terdiri atas:
   a. Surat lamaran asli bermaterai Rp.10.000,- diketik menggunakan komputer dengan huruf kapital Arial 11 ditujukan kepada Bupati Belitung Timur di Manggar (file ber format PDF ukuran maksimal 1000 kb);
   b. KTP Asli/Surat Keterangan Perekaman E-KTP yang masih berlaku Asli (Format JPG max size 1000 kb);
   c. Surat Pernyataan Data Diri Pelamar yang ditandatangani diatas materai Rp.10.000,- (file berformat PDF ukuran maksimal 1000 kb);
   d. Ijazah Asli sesuai kualifikasi pendidikan, khusus pelamar jabatan dokter ahli pertama, dokter gigi ahli pertama, apoteker ahli pertama dan perawat ahli pertama juga melampirkan ijazah S-1 Asli dan ijazah profesi Asli. (digabung dalam satu file format PDF ukuran maksimal 1000 kb);
   e. Transkrip Nilai Asli, khusus pelamar jabatan dokter ahli pertama, dokter gigi ahli pertama, apoteker ahli pertama dan Peawat ahli Pertama juga melampirkan transkrip nilai ijazah S-1 Asli dan transkrip nilai ijazah profesi Asli. (digabung dalam satu file format PDF ukuran maksimal 1000 kb);
   f. Sertifikat atau Tangkapan Layar *(Screenshot)* pada PDDIKTI / BAN-PT dari Akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
   g. Pas Foto terbaru (menggunakan kemeja putih lengan panjang, dasi hitam dan bagi yang berhijab mengenakan jilbab warna hitam dengan latar belakang foto berwarna merah (Format JPG ukuran maksimal 1000 kb) ;
   h. Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis/tingkat disabilitas (bagi pelamar disabilitas). (File Format PDF ukuran maksimal 1000 kb);
   i. *LINK* (tautan) video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar;
   j. Scan berwarna STR Asli bagi Jabatan Fungsional Kesehatan yang mensyaratkan STR sesuai Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 322 Tahun 2024 yang masih berlaku, khusus bagi pelamar formasi tenaga kesehatan. (file format PDF ukuran maksimal 1000 kb);
   k. Seluruh dokumen yang di scan adalah dokumen asli, bukan dokumen hasil fotocopy yang di scan. Contoh Ijazah, yang di scan adalah ijazah asli, bukan ijazah fotocopy legalisir asli;

   Harap memastikan bahwa seluruh dokumen yang telah dipindai dan diunggah dapat terbaca pada layar monitor komputer/ponsel secara vertikal, bukan horizontal.
   a. Cek Resume dan akhiri pendaftaran;
   b. Cetak Kartu Informasi Akun dan Kartu Pendaftaran Akun.

7. Pendaftaran hanya dapat dilakukan secara online dengan waktu yang ditentukan dalam portal *https: // sscasn. bkn.go.id*
8. Pelamar dapat melamar pada 1 (satu) jenis jalur kebutuhan ASN yaitu PNS atau PPPK pada Tahun anggaran yang sama
9. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) Instansi dan 1 (satu) Kebutuhan jabatan, dalam hal pelamar diketahui melamar :
   a. lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PNS; atau
   b. menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/ atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pelamar memastikan seluruh data yang dimasukkan dan dokumen yang diunggah sudah lengkap, benar, dan dokumen dapat terbaca (kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi); dan
11. Pelamar mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak Kartu Pendaftaran untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran (pelamar sudah tidak dapat mengubah data kembali).

V. TAHAPAN SELEKSI

Tahapan Seleksi pengadaan CPNS terdiri dari 3 (tiga) tahap dengan sistem gugur, yang meliputi:

1. Seleksi administrasi;
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD); dan
3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

VI. SISTEM KELULUSAN DAN BOBOT PENILAIAN SELEKSI

1. Seleksi Administrasi
   Kelulusan Seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi kesesuaian dokumen yang diunggah oleh pelamar pada laman *https://sscasn.bkn.go.id* dengan persyaratan yang telah ditentukan. Adapun kelulusan seleksi administrasi akan diumumkan pada laman *https://bkpsdm.beltim.go.id* dan *https://sscasn.bkn.go.id*.
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
   Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS dilaksanakan dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) yang didasarkan pada nilai ambang batas *(passing grade)* yang diatur dalam Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024. Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SDK) CPNS meliputi
   a) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)
   b) Tes Intelegensi Umum (TIU)
   c) Tes Karakteristik Pribadi (TKP)
3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
   Peserta yang berhak mengikuti SKB adalah peserta yang dinyatakan lulus SKD dan termasuk dalam 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi nilai ambang batas.
4. Hasil Akhir Seleksi
   Kelulusan akhir seleksi CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur T.A. 2024 ditentukan berdasarkan hasil integrasi nilai SKD dengan bobot 40% dan SKB dengan bobot 60% oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara.

5. Pengumaman peserta yang dinyatakan lulus dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) berdasarkan hasil integrasi nilai SKD dan SKB dari Panitia Seleksi Nasional.
6. Penetapan dan pengumuman terhadap peserta seleksi yang dinyatakan lulus harus sesuai dengan jumlah formasi pada masing-masing jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
7. Dalam hal peserta seleksi dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, namun tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan NIP oleh Badan Kepegawaian Negara, maka PPK tidak dapat menetapkan Surat Keputusan Pengangkatan yang bersangkutan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

VII. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

1. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan melalui https://sscasn.bkn.go.id dan *https://bkpsdm.beltim.go.id*;
2. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mengikuti Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT);
3. Jadwal Pelaksanaan bersifat tentatif dan apabila ada perubahan akan diumumkan kembali melalui laman *https://bkpsdm.beltim.go.id*.

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d 17 Desember 2024
16	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024

17	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
18	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
19	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
21	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
22	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
23	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d 12 Januari 2025
24	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
25	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
26	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
27	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
28	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

*jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian

VIII. KETENTUAN KHUSUS

1. Pengisian kebutuhan yang belum terpenuhi dilakukan dengan ketentuan sebagai beriku sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024:
   a. Bagi Jabatan pada kebutuhan umum belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang memiliki Jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi kebutuhan yang sama, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik; dan
   b. Bagi Jabatan pada kebutuhan khusus belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang sama dengan Jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan khusus yang sama dan berperingkat terbaik.
2. Dalam hal terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir sebagaimana angka 1 (satu) diatas, dapat diisi dari pelamar kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan/ lokasi kebutuhan berbeda serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik.
3. Pelamar pada Pengadaan Pegawai Negeri Sipil tahun anggaran 2024 dapat menggunakan nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang diperoleh dalam seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil tahun anggaran 2023 dengan ketentuan sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 Dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.

IX. LOKASI PELAKSANAAN SELEKSI

Pelaksanaan Seleksi Ujian bertempat di Gedung Computer Asissted Test (CAT) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur dan titik lokasi ujian lainnya yang disediakan oleh Badan Kepegawaian Negara.

X. LAIN-LAIN

1. Pengumuman Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 secara resmi melalui laman *https://sscasn.bkn.go.id* dan *https://bkpsdm.beltim.go.id*;
2. Peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
3. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai BKPSDM atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Panitia Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS;;
5. Untuk penggunaan meterai elektronik (e-meterai) adalah meterai elektronik yang terintegrasi antara SSCASN dengan PERUM PERURI dalam pembubuhan meterainya dan pembubuhan meterai elektronik dilakukan pada SSCASN ataupun website distributor atau website Mitra Distributor setelah dilakukan pembelian;
6. Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada di *website: https://bkpsdm.beltim.go.id/* apabila terdapat perubahan jadwal/ informasi sewaktu waktu, maka yang dipakai adalah informasi terkahir;
7. Dalam proses seleksi ini tidak dipungut biaya;
8. Pendaftaran yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah;
9. Panitia Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Belitung Timur T.A. 2024 tidak menerima berkas secara langsung maupun via Pos;
10. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggah melalui laman *https://sscasn.bkn.go.id* paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Panitia Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Belitung Timur T.A. 2024 dapat menerima atau menolak alasan sanggah yang diajukan pelamar setelah dilakukan verifikasi kembali terhadap kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar. Alasan sanggah dapat diterima dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
11. Bagi pelamar penyandang disabilitas yang tidak melampirkan surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya dan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar sampai batas akhir masa sanggah pengumuman hasil akhir seleksi, Panitia Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Belitung Timur T.A. 2024 dapat menyatakan pelamar penyandang disabilitas tidak memenuhi syarat dan membatalkan kelulusan/keikutsertaan dalam seleksi;
12. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Seleksi Pengadaan Panitia Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dapat menggantikannya dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panselnas;
13. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan nomor induk calon PNS kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya.
14. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negeri Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggugugat.

15. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan pengadaan CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 dapat menghubungi:
    a. Helpdesk CASN Kabupaten Belitung Timur
        - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur pada hari dan jam kerja Senin s.d Jumat Pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB.
        - SSCASN Helpdesk *htpps://sscasn.bkn.go.id*
    b. Media Sosial Resmi Instagram: @infobkpsdmbeltim.
    c. Panitia tidak membuka layanan melalui telepon, whatsapp atau media lainnya selain yangdisebutkan di atas. Peserta harap berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan Panitia.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Manggar, 16 Agustus 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR

Drs. BURHANUDIN

Lampiran I Pengumuman Bupati Belitung Timur
Nomor : KP.02/ 015 /PENGUMUMAN/BUPATI/2024
Tanggal : 16 Agustus 2024

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN
			DISABILITAS	UMUM	
1	2	3	4	5	6
JUMLAH KESELURUHAN					
1. TENAGA KESEHATAN				88	
1	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN
2	Apoteker Ahli Pertama	PROFESI APOTEKER		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS RENGGIANG
3	Apoteker Ahli Pertama	PROFESI APOTEKER		2	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UOBK RSUD MUHAMMAD ZEIN | BIDANG PENUNJANG | SEKSI PENUNJANG MEDIK
4	Apoteker Ahli Pertama	PROFESI APOTEKER		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS GANTUNG
5	Apoteker Ahli Pertama	PROFESI APOTEKER		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS MANGGAR
6	Asisten Apoteker Terampil	D-III FARMASI		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS MANGGAR
7	Asisten Apoteker Terampil	D-III FARMASI		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS SIMPANG PESAK

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN
			DISABILITAS	UMUM	
1	2	3	4	5	6
8	Bidan Ahli Pertama	PROFESI BIDAN		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UOBK RSUD MUHAMMAD ZEIN | BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN | SEKSI PELAYANAN KEPERAWATAN
9	Bidan Terampil	D-III KEBIDANAN		4	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS KELAPA KAMPIT
10	Bidan Terampil	D-III KEBIDANAN		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS MANGGAR
11	Bidan Terampil	D-III KEBIDANAN		2	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS MENGKUBANG
12	Bidan Terampil	D-III KEBIDANAN		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS DENDANG
13	Bidan Terampil	D-III KEBIDANAN		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS RENGGIANG | PENANGGUNGJAWAB PELAYANAN PUSKESMAS DAN JEJARING FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN | POS KESEHATAN DESA LINTANG
14	Bidan Terampil	D-III KEBIDANAN		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS MANGGAR | PENANGGUNGJAWAB PELAYANAN PUSKESMAS DAN JEJARING FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN | PONDOK BERSALIN DESA LALANG
15	Bidan Terampil	D-III KEBIDANAN		2	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS RENGGIANG
16	Bidan Terampil	D-III KEBIDANAN		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UOBK RSUD MUHAMMAD ZEIN | BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN | SEKSI PELAYANAN KEPERAWATAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN
			DISABILITAS	UMUM	
1	2	3	4	5	6
17	Bidan Terampil	D-III KEBIDANAN		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS RENGGIANG | PENANGGUNGJAWAB PELAYANAN PUSKESMAS DAN JEJARING FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN | POS KESEHATAN DESA AIK MADU
18	Bidan Terampil	D-III KEBIDANAN		2	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS SIMPANG PESAK
19	Bidan Terampil	D-III KEBIDANAN		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS GANTUNG | PENANGGUNGJAWAB PELAYANAN PUSKESMAS DAN JEJARING FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN | POS KESEHATAN DESA PULAU LONG
20	Bidan Terampil	D-III KEBIDANAN		3	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS GANTUNG
21	Bidan Terampil	D-III KEBIDANAN		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS SIMPANG PESAK | PENANGGUNGJAWAB PELAYANAN PUSKESMAS DAN JEJARING FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN | POS KESEHATAN DESA DUKONG
22	Bidan Terampil	D-III KEBIDANAN		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS MANGGAR | PENANGGUNGJAWAB PELAYANAN PUSKESMAS DAN JEJARING FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN | POS KESEHATAN DESA LALANG JAYA
23	Dokter Ahli Pertama	SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UOBK RSUD MUHAMMAD ZEIN | BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN | SEKSI PELAYANAN MEDIK
24	Dokter Ahli Pertama	PROFESI DOKTER		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS KELAPA KAMPIT
25	Dokter Ahli Pertama	PROFESI DOKTER		2	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS MANGGAR

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN
			DISABILITAS	UMUM	
1	2	3	4	5	6
26	Dokter Ahli Pertama	PROFESI DOKTER		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS GANTUNG
27	Dokter Ahli Pertama	PROFESI DOKTER		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS MENGKUBANG
28	Dokter Ahli Pertama	SPESIALIS UROLOGI		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UOBK RSUD MUHAMMAD ZEIN | BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN | SEKSI PELAYANAN MEDIK
29	Dokter Ahli Pertama	PROFESI DOKTER		5	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UOBK RSUD MUHAMMAD ZEIN | BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN | SEKSI PELAYANAN MEDIK
30	Dokter Ahli Pertama	PROFESI DOKTER		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS DENDANG
31	Dokter Ahli Pertama	PROFESI DOKTER		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS RENGGIANG
32	Dokter Gigi Ahli Pertama	PROFESI DOKTER GIGI		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS KELAPA KAMPIT
33	Dokter Gigi Ahli Pertama	PROFESI DOKTER GIGI		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS RENGGIANG
34	Dokter Gigi Ahli Pertama	PROFESI DOKTER GIGI		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS SIMPANG PESAK

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN
			DISABILITAS	UMUM	
1	2	3	4	5	6
35	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama	S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
36	Fisioterapis Ahli Pertama	PROFESI FISIOTERAPIS		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UOBK RSUD MUHAMMAD ZEIN | BIDANG PENUNJANG | SEKSI PENUNJANG MEDIK
37	Nutrisionis Terampil	D-III GIZI		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS MENGKUBANG
38	Nutrisionis Terampil	D-III GIZI		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS DENDANG
39	Nutrisionis Terampil	D-III GIZI		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS RENGGIANG
40	Penata Anestesi Ahli Pertama	D-IV PENATA ANESTESI		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UOBK RSUD MUHAMMAD ZEIN | BIDANG PENUNJANG | SEKSI PENUNJANG MEDIK
41	Perawat Ahli Pertama	PROFESI NERS		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS RENGGIANG
42	Perawat Ahli Pertama	PROFESI NERS		3	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UOBK RSUD MUHAMMAD ZEIN | BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN | SEKSI PELAYANAN KEPERAWATAN
43	Perawat Terampil	D-III KEPERAWATAN		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS GANTUNG

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN
			DISABILITAS	UMUM	
1	2	3	4	5	6
44	Perawat Terampil	D-III KEPERAWATAN		5	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS SIMPANG PESAK
45	Perawat Terampil	D-III KEPERAWATAN		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS DENDANG
46	Perawat Terampil	D-III KEPERAWATAN		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UOBK RSUD MUHAMMAD ZEIN | BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN | SEKSI PELAYANAN KEPERAWATAN
47	Perekam Medis Ahli Pertama	D-IV PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN / D-IV REKAM MEDIK / S-1 REKAM MEDIS / S-1 REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN / S-1 MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN / D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UOBK RSUD MUHAMMAD ZEIN | BIDANG PENUNJANG | SEKSI PENUNJANG NON MEDIK
48	Perekam Medis Terampil	D-III PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III ILMU REKAM MEDIS / D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III REKAM MEDIS		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS RENGGIANG
49	Perekam Medis Terampil	D-III ILMU REKAM MEDIS / D-III PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III REKAM MEDIK		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS GANTUNG
50	Perekam Medis Terampil	D-III ILMU REKAM MEDIS / D-III PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III PEREKAM DAN INFORMATIKA KESEHATAN / D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMATIKA KESEHATAN / D-III REKAM MEDIK / D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UOBK RSUD MUHAMMAD ZEIN | BIDANG PENUNJANG | SEKSI PENUNJANG NON MEDIK
51	Perekam Medis Terampil	D-III ILMU REKAM MEDIS / D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III REKAM MEDIS		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS MANGGAR
52	Perekam Medis Terampil	D-III REKAM MEDIS / D-III ILMU REKAM MEDIS / D-III PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS KELAPA KAMPIT

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN
			DISABILITAS	UMUM	
1	2	3	4	5	6
53	Perekam Medis Terampil	D-III ILMU REKAM MEDIS / D-III PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III PEREKAM DAN INFORMATIKA KESEHATAN / D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMATIKA KESEHATAN / D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMATIKA KESEHATAN / D-III		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS MENGKUBANG
54	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS GANTUNG
55	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	D-III ANALIS KESEHATAN		3	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UOBK RSUD MUHAMMAD ZEIN | BIDANG PENUNJANG | SEKSI PENUNJANG MEDIK
56	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS RENGGIANG
57	Teknisi Transfusi Darah Terampil	D-III TRANSFUSI DARAH		3	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UOBK RSUD MUHAMMAD ZEIN | BIDANG PENUNJANG | SEKSI PENUNJANG MEDIK
58	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
59	Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
60	Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III SANITASI		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS RENGGIANG
61	Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III SANITASI		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS DENDANG

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN
			DISABILITAS	UMUM	
1	2	3	4	5	6
62	Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III SANITASI		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UOBK RSUD MUHAMMAD ZEIN | BIDANG PENUNJANG | SEKSI PENUNJANG NON MEDIK
63	Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III SANITASI		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS MENGKUBANG
64	Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III SANITASI		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS SIMPANG PESAK

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

Lampiran II Pengumuman Bupati Belitung Timur
Nomor : KP.02/ 015 /PENGUMUMAN/BUPATI/2024
Tanggal : 16 Agustus 2024

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN
			DISABILITAS	UMUM	
1	2	3	4	5	6
JUMLAH KESELURUHAN					
2. TENAGA TEKNIS			4	114	
1	Analis Hukum Ahli Pertama	S-1 HUKUM		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
2	Analis Kebijakan Ahli Pertama	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN | BIDANG APLIKASI INFORMATIKA
3	Analis Kebijakan Ahli Pertama	S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 AKUNTANSI / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | BIDANG REHABILITASI PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
4	Analis Kebijakan Ahli Pertama	S-1 SOSIOLOGI		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN ORGANISASI
5	Analis Kebijakan Ahli Pertama	S-1 AKUNTANSI / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 SASTRA INGGRIS		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN INFORMASI
6	Analis Kebijakan Ahli Pertama	S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
7	Analis Kebijakan Ahli Pertama	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BAGIAN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN SUMBER DAYA ALAM

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN
			DISABILITAS	UMUM	
1	2	3	4	5	6
8	Analis Kebijakan Ahli Pertama	S-1 ILMU PEMERINTAHAN		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA
9	Analis Kebijakan Ahli Pertama	S-1 TRANSPORTASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 AGRIBISNIS		2	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA
10	Analis Kebijakan Ahli Pertama	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK
11	Analis Kebijakan Ahli Pertama	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
12	Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	S-1 TEKNOLOGI PANGAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 AGRIBISNIS / S-1 EKONOMI PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | BIDANG KETAHANAN PANGAN
13	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | BIDANG PERBENDAHARAAN | SUB BIDANG ADMINISTRASI PERBENDAHARAAN
14	Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama	S-1 AGRIBISNIS / S-1 EKONOMI PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
15	Arsiparis Terampil	D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III KEARSIPAN / D-III MANAJEMEN / D-III SISTEM INFORMASI		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN
			DISABILITAS	UMUM	
1	2	3	4	5	6
16	Arsiparis Terampil	D-III KEARSIPAN		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS SIMPANG PESAK | TATA USAHA
17	Arsiparis Terampil	D-III KEARSIPAN / D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III JURNALISTIK / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III SISTEM INFORMASI / D-III PERPUSTAKAAN / D-III DESAIN GRAFIS / D-III MANAJEMEN ASET		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS MANGGAR | TATA USAHA
18	Arsiparis Terampil	D-III KEARSIPAN		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
19	Arsiparis Terampil	D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III KEARSIPAN / D-III SISTEM INFORMASI	1	0	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS PENDIDIKAN | SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
20	Arsiparis Terampil	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III KEARSIPAN / D-III STATISTIKA TERAPAN / D-III TEKNOLOGI INFORMASI		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS PERIKANAN | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
21	Arsiparis Terampil	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI RUMAH SAKIT / D-III HUBUNGAN MASYARAKAT / D-III KEARSIPAN / D-III MANAJEMEN		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS KELAPA KAMPIT | TATA USAHA
22	Arsiparis Terampil	D-III TEKNOLOGI KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III SISTEM INFORMASI / D-III PERPUSTAKAAN / D-III MULTIMEDIA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III DESAIN GRAFIS / D-III KEARSIPAN / D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS MENGKUBANG | TATA USAHA
23	Arsiparis Terampil	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III KEARSIPAN / D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III SISTEM INFORMASI		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | SEKRETARIAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
24	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S-1 PSIKOLOGI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR, MUTASI, PROMOSI DAN PENGHARGAAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN
			DISABILITAS	UMUM	
1	2	3	4	5	6
25	DOKUMENTALIS HUKUM	D-III MANAJEMEN		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN HUKUM
26	Manggala Informatika Ahli Pertama	S-1 INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNIK ELEKTRO		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN | BIDANG KEAMANAN INFORMASI, PERSANDIAN DAN STATISTIK
27	Pamong Budaya Ahli Pertama	S-1 SENI TARI		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | BIDANG KEBUDAYAAN
28	Paramedik Veteriner Terampil	D-III PARAMEDIK VETERINER / D-III KESEHATAN HEWAN		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
29	Pekerja Sosial Ahli Pertama	D-IV PEKERJAAN SOSIAL / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
30	Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 ARSITEKTUR / S-1 TEKNIK ARSITEKTUR		2	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | BIDANG BINA MARGA
31	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	S-1 KEPERAWATAN		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UOBK RSUD MUHAMMAD ZEIN | BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN | SEKSI PELAYANAN KEPERAWATAN
32	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama	S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM / S-1 HUKUM SYARIAH		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
33	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 PLANOLOGI / S-1 TEKNIK ARSITEKTUR		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | BIDANG CIPTA KARYA
34	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Pertama	S-1 KEPENDUDUKAN / S-1 KEPERAWATAN / S-1 MANAJEMEN		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | BIDANG KELUARGA BERENCANA, KESEJAHTERAAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA
35	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Pertama	S-1 KEPENDUDUKAN DAN STATISTIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 KEPERAWATAN / S-1 ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN INFORMASI

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN
			DISABILITAS	UMUM	
1	2	3	4	5	6
36	Penata Laksana Barang Terampil	D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN ASET / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | KECAMATAN KELAPA KAMPIT | SEKRETARIAT KECAMATAN KELAPA KAMPIT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
37	Penata Laksana Barang Terampil	D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN ASET / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN KEUANGAN		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | SEKRETARIAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
38	Penata Laksana Barang Terampil	D-III MANAJEMEN PAJAK / D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN ASET / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN		4	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS PENDIDIKAN | SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
39	Penata Laksana Barang Terampil	D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN ASET / D-III MANAJEMEN / D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | KECAMATAN MANGGAR | SEKRETARIAT KECAMATAN MANGGAR | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
40	Penata Laksana Barang Terampil	D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN ASET		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG | SEKRETARIAT KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
41	Penata Laksana Barang Terampil	D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN ASET / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI / D-III ADMINISTRASI BISNIS		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN | SUB BAGIAN KEUANGAN
42	Penata Laksana Barang Terampil	D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN ASET / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III MANAJEMEN		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | SEKRETARIAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
43	Penata Laksana Barang Terampil	D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN ASET / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI / D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | SEKRETARIAT DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
44	Penata Laksana Barang Terampil	D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III MULTIMEDIA / D-III MANAJEMEN / D-III AKUNTANSI		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | KECAMATAN GANTUNG | SEKRETARIAT KECAMATAN GANTUNG | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN
			DISABILITAS	UMUM	
1	2	3	4	5	6
45	Penata Laksana Barang Terampil	D-III MANAJEMEN / D-III AKUNTANSI		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
46	Penata Laksana Barang Terampil	D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | SEKRETARIAT
47	Penata Laksana Barang Terampil	D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN ASET / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | KECAMATAN DENDANG | SEKRETARIAT KECAMATAN DENDANG | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
48	Penata Laksana Barang Terampil	D-III MANAJEMEN / D-III AKUNTANSI		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | SEKRETARIAT DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | SUBBAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN, DAN PELAPORAN
49	Penata Laksana Barang Terampil	D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III MANAJEMEN PAJAK		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | SEKRETARIAT DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
50	Penata Laksana Barang Terampil	D-III MANAJEMEN / D-III AKUNTANSI		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | KECAMATAN SIMPANG PESAK | SEKRETARIAT KECAMATAN SIMPANG PESAK | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
51	Penata Laksana Barang Terampil	D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN / D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN KEUANGAN		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | SEKRETARIAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
52	Penata Laksana Barang Terampil	D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN
			DISABILITAS	UMUM	
1	2	3	4	5	6
53	Penata Laksana Barang Terampil	D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN ASET / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN / D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | SEKRETARIAT DINAS PENENAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
54	Penata Laksana Barang Terampil	D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III DESAIN GRAFIS / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN ASET / D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN UMUM
55	Penata Laksana Barang Terampil	D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN ASET / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN / D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI / D-III TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN / D-III ADMINISTRASI BISNIS		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | SEKRETARIAT DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
56	Penata Perizinan Ahli Pertama	S-1 AKUNTANSI / S-1 HUKUM / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN		2	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
57	Penata Ruang Ahli Pertama	S-1 ARSITEKTUR / S-1 PLANOLOGI		2	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | BIDANG PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
58	Peneliti Ahli Pertama	S-2 EKONOMI PEMBANGUNAN		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
59	Penera Terampil	D-III INSTRUMENTASI DAN METROLOGI / D-III METROLOGI DAN INSTRUMENTASI		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | BIDANG PERDAGANGAN
60	Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama	S-1 BUDI DAYA PETERNAKAN / S-1 ILMU PETERNAKAN / S-1 INDUSTRI PETERNAKAN / S-1 NUTRISI DAN PAKAN TERNAK / S-1 PENYULUH PETERNAKAN / S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL TERNAK / S-1 TEKNOLOGI PAKAN TERNAK		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN
			DISABILITAS	UMUM	
1	2	3	4	5	6
61	PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT	S-1 TRANSPORTASI / S-1 SIPIL / S-1 TEKNIK MESIN		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS PERHUBUNGAN | BIDANG ANGKUTAN JALAN | SEKSI ANGKUTAN TIDAK DALAM TRAYEK DAN BARANG
62	PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT	S-1 TRANSPORTASI		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS PERHUBUNGAN | BIDANG ANGKUTAN JALAN | SEKSI ANGKUTAN DALAM TRAYEK DAN TERMINAL
63	PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT	S-1 TRANSPORTASI		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS PERHUBUNGAN | BIDANG LALU LINTAS JALAN | SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS
64	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III BAHASA INGGRIS / D-III MANAJEMEN / D-III PARIWISATA		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | SUB BAGIAN PROTOKOL
65	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	D-III KOMUNIKASI MASSA / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN		2	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
66	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Pertama	S-1 AKUAKULTUR		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS PERIKANAN | BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN
67	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AGRIBISNIS / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 HUKUM / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK TRANSPORTASI LAUT / S-1 TEKNIK KOMPUTER		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | SUB BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA
68	Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pertama	S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 TEKNIK PENGAIRAN / S-1 TEKNIK GEOLOGI / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK ARSITEKTUR		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | BIDANG SUMBER DAYA AIR
69	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Pertama	S-1 AGRONOMI / S-1 HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN / S-1 PERLINDUNGAN TANAMAN / S-1 PROTEKSI TANAMAN		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | BIDANG PERKEBUNAN
70	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Pertama	S-1 AGRONOMI / S-1 HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN / S-1 PERLINDUNGAN TANAMAN / S-1 PROTEKSI TANAMAN		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN
			DISABILITAS	UMUM	
1	2	3	4	5	6
71	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	S-1 SOSIOLOGI / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 PSIKOLOGI / S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL / S-1 ILMU KOMUNIKASI		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN, PENATAAN, DAN KERJASAMA ANTAR DESA
72	Penyuluh Pertanian Terampil	D-III BUDIDAYA PERTANIAN / D-III PENYULUHAN PERTANIAN / D-III PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN / D-III TEKNIK PERTANIAN		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN
73	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	S-1 HUKUM		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN HUKUM
74	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	S-1 HUKUM		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
75	Perencana Ahli Pertama	S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | SEKRETARIAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
76	Perencana Ahli Pertama	S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | SEKRETARIAT DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
77	Perencana Ahli Pertama	S-1 ARSITEKTUR / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 PLANOLOGI / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN		2	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS PENDIDIKAN | SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN
78	Perencana Ahli Pertama	S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 EKONOMI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
79	Perencana Ahli Pertama	S-1 EKONOMI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 FISIKA / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 PLANOLOGI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | BIDANG PEREKONOMIAN, SUMBER DAYA ALAM, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN
			DISABILITAS	UMUM	
1	2	3	4	5	6
80	Perencana Ahli Pertama	S-1 AKUNTANSI / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | INSPEKTORAT DAERAH | SEKRETARIAT INSPEKTORAT
81	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU POLITIK / S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT / S-1 SASTRA INGGRIS / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	3	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN | BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
82	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 HUKUM		2	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
83	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UOBK RSUD MUHAMMAD ZEIN | BAGIAN TATA USAHA | SUB BAGIAN UMUM DAN ASET
84	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	D-III DESAIN GRAFIS / D-III DESAIN KOMUNIKASI VISUAL		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
85	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	D-III DESAIN GRAFIS / D-III DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / D-III HUBUNGAN MASYARAKAT / D-III JURNALISTIK / D-III FOTOGRAFI / D-III KOMUNIKASI / D-III MULTIMEDIA / D-III PENYIARAN / D-III TEKNOLOGI MULTIMEDIA DAN BROADCASTING		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS PENDIDIKAN | SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
86	PRANATA KEWILAYAHAN	S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 SAINS INFORMASI GEOGRAFI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 PERENCANAAN WILAYAH / S-1 PENDIDIKAN GEOGRAFI		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA
87	Pranata Komputer Ahli Pertama	S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN ORGANISASI

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN
			DISABILITAS	UMUM	
1	2	3	4	5	6
88	Pranata Komputer Ahli Pertama	S-1 SISTEM INFORMASI		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UOBK RSUD MUHAMMAD ZEIN | BAGIAN TATA USAHA | SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN INFORMASI
89	Pranata Komputer Ahli Pertama	S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN | BIDANG APLIKASI INFORMATIKA
90	Pranata Komputer Ahli Pertama	S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | BIDANG BINA KONTRUKSI
91	Pranata Komputer Terampil	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNOLOGI INFORMASI		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
92	Pranata Komputer Terampil	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNOLOGI INFORMASI		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS SIMPANG PESAK | TATA USAHA
93	Pranata Komputer Terampil	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNOLOGI INFORMASI		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS DENDANG | TATA USAHA
94	Pranata Komputer Terampil	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNOLOGI INFORMASI		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN | SUB BAGIAN KEUANGAN
95	Pranata Komputer Terampil	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS KELAPA KAMPIT | TATA USAHA
96	Pranata Komputer Terampil	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI	1	1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS PENDIDIKAN | SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN
97	Pranata Komputer Terampil	D-III SISTEM INFORMASI		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | SEKRETARIAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
98	Pranata Komputer Terampil	D-III SISTEM INFORMASI		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG | SEKRETARIAT KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG | SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERENCANAAN
99	Pranata Komputer Terampil	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS MENGKUBANG | TATA USAHA

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN
			DISABILITAS	UMUM	
1	2	3	4	5	6
100	Pranata Komputer Terampil	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNOLOGI INFORMASI		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS RENGGIANG | TATA USAHA
101	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN UMUM
102	Sandiman Ahli Pertama	S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 MATEMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN | BIDANG KEAMANAN INFORMASI, PERSANDIAN DAN STATISTIK
103	Statistisi Ahli Pertama	S-1 STATISTIKA		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN | BIDANG KEAMANAN INFORMASI, PERSANDIAN DAN STATISTIK
104	Teknisi Kesehatan Ikan Terampil	D-III BUDIDAYA PERIKANAN / D-III KESEHATAN LINGKUNGAN		1	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | DINAS PERIKANAN | BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

MANGGAR, ... 2024

KEPADA

YTH. BUPATI BELITUNG TIMUR

Di -

MANGGAR

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

NAMA	:
NIK	:
JENIS KELAMIN	:
TEMPAT / TANGGAL LAHIR	:
PENDIDIKAN / JURUSAN	:
JABATAN YANG DI LAMAR	:
ALAMAT	:
NO. TELP / HP	:

DENGAN INI MENYAMPAIKAN SURAT LAMARAN UNTUK DAPAT DITERIMA MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024. SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN, DENGAN INI DISAMPAIKAN DOKUMEN KELENGKAPAN YANG TELAH DIUNGGAH SEBAGAI BERIKUT :

1. SCAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)/ SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN DARI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL;
2. PAS PHOTO TERBARU MENGGUNAKAN PAKAIAN KEMEJA PUTIH LENGAN PANJANG, JILBAB HITAM BAGI WANITA YANG MENGGUNAKAN JILBAB DENGAN LATAR BELAKANG MERAH;
3. SCAN JAZAH ASLI;
4. SCAN TRANSKRIP NILAI ASLI;
5. SERTIFIKAT ATAU TANGKAPAN LAYAR (SCREENSHOT) PADA PDDIKTI / BAN-PT DARI AKREDITASI PERGURUAN TINGGI DAN/ATAU PROGRAM STUDI PADA SAAT KELULUSAN PELAMAR YANG DIBUKTIKAN DENGAN TANGGAL KELULUSAN YANG TERTULIS PADA IJAZAH;
6. SCAN SURAT PERNYATAAN DATA DIRI PELAMAR YANG DITANDATANGANI DIATAS MATERAI RP. 10.000,-;
7. SCAN STR ASLI BAGI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN YANG MENSYARATKAN STR SESUAI KEPUTUSAN MENTERI PAN DAN RB NOMOR 322 TAHUN;*
8. SCAN SURAT KETERANGAN ASLI DARI DOKTER RUMAH SAKIT PEMERINTAH / PUSKESMAS BAGI PELAMAR PENYANDANG DISABILITAS YANG MENERANGKAN JENIS DAN DERAJAT KEDISABILITASANNYA;**

SELURUH DATA DAN DOKUMEN YANG SAYA BERIKAN ADALAH BENAR. APABILA DIKEMUDIAN HARI DITEMUKAN DATA YANG TIDAK BENAR, MAKA SAYA MENERIMA KEPUTUSAN PANITIA SELEKSI MEMBATALKAN KEIKUTSERTAAN/KELULUSAN SAYA PADA SELEKSI CPNS PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR T AHUN ANGGARAN 2024.

DEMIKIAN PERMOHONAN INI DISAMPAIKAN, ATAS PERHATIANNYA DIUCAPKAN TERIMA KASIH.

HORMAT SAYA,

E-Materai
Rp. 10.000,-

TTD

(NAMA LENGKAP)

*) berkas nomor 7 hanya untuk pelamar tenaga kesehatan yang mensyaratkan STR

**) berkas nomor 8 hanya untuk pelamar penyandang disabilitas

Lampiran IV Pengumuman Bupati Belitung Timur
Nomor : KP.02/ 015 /PENGUMUMAN/BUPATI/2024
Tanggal : 16 Agustus 2024

SURAT PERNYATAAN DATA DIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:
Tempat dan tanggal lahir	:
Agama	:
Alamat	:

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1) Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4) Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6) Tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya dan jika dinyatakan lulus seleksi CPNS bersedia membuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari instansi yang berwenang;
7) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan satuan kerja/unit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur; dan
8) Memiliki integritas yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9) Bersedia mengabdi dan tidak mengajukan permohonan pindah keluar Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan alasan pribadi, sebelum memiliki masa kerja aktif sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak PNS, jika mengajukan pindah dengan alasan pribadi bersedia diberhentikan dengan hormat dan membuat surat pengunduran diri sebagai CPNS maupun sebagai PNS, sesuai dengan PERMENPANRB Nomor 6 Tahun 2024;
10) Bersedia menerima segala Keputusan Panitia Pengadaan ASN dan tidak akan mengganggu gugat.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

....., ...
Yang Membuat Pernyataan,

E-Materai
Rp. 10.000,-

TTD

(NAMA LENGKAP)